



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KAB SUKOHARJO

Sinta Nur Aini, Arif Nugroho Rachman

Progdi Akuntansi, [sintanuraini850@gmail.com](mailto:sintanuraini850@gmail.com), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta  
 Progdi Akuntansi, [arifnugroho.rachman@gmail.com](mailto:arifnugroho.rachman@gmail.com), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

### ABSTRAK

*In this study, the impact of the following factors will be assessed: (1) taxpayer awareness of motor vehicle taxpayer compliance in Sukoharjo regency; (2) Tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Sukoharjo regency; (3) taxation socialization of motor vehicle taxpayer compliance in Sukoharjo regency; and (4) taxpayer service quality on motor vehicle taxpayer compliance in Sukoharjo regency. 541,604 people made up the study population, and 100 taxpayers made up the sample. Data collection techniques through surveys and to analyze data using validity test, reliability test, classical assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity Test), T test, F test, and R Test. Significance value of 0.25 obtained from the analysis of the T test indicates that the taxpayer awareness variables significantly affect taxpayer compliance. Significance score of 0.04 indicates that the variable tax sanctions have a considerable impact on taxpayer compliance. Significance score of 1,000 indicates that the tax socialization variable has no significant effect on taxpayer compliance. Significance value of 0.046 indicates that the quality of tax services that vary significantly affect taxpayer compliance.*

*Kata kunci: Taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax sanctions, tax socialization, tax service quality*

### Abstrak

Pada riset ini, akibat dari faktor-faktor berikut akan dinilai: (1) kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak alat transportasi bermotor di Kabupaten Sukoharjo; (2) sanksi pajak atas kepatuhan wajib pajak alat transportasi bermotor di Kabupaten Sukoharjo; (3) sosialisasi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak alat transportasi bermotor di Kabupaten Sukoharjo; dan (4) kualitas pelayanan pajak atas kepatuhan wajib pajak alat transportasi bermotor di Kabupaten Sukoharjo. 541. 604 orang membuat populasi riset, serta 100 pembayar pajak membuat ilustrasi. Metode pengumpulan informasi melewati survey serta buat menganalisa informasi memakai percobaan keabsahan, percobaan reliabilitas, percobaan anggapan klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), uji T, uji F, dan uji R. Angka signifikansi sebesar 0, 25 yang didapat dari hasil analisa percobaan T membuktikan kalau elastis pemahaman wajib pajak mempengaruhi penting kepada kepatuhan wajib pajak. Angka signifikansi 0, 04 membuktikan kalau elastis ganjaran pajak mempunyai akibat yang lumayan besar kepada kepatuhan wajib pajak. Angka signifikansi 1.000 membuktikan kalau elastis pemasyarakatan pajak tidak mempengaruhi penting kepada kepatuhan wajib pajak. Angka signifikansi sebesar 0, 046 membuktikan kalau kualitas layanan pajak yang bermacam- macam mempengaruhi kepada wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak

### 1. PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber penerimaan Negera terbanyak serta sangat berarti untuk terwujudnya serta kenaikan pembangunan Negera guna menggapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Sebagian hasil pemasukan pajak digunakan untuk membangun sarana universal. Mengingat kedudukan zona pajak dalam penerimaan pajak, pemerintah berupaya tingkatkan penerimaan pajak dengan tingkatkan konsistensi orang dalam membayar pajak, hingga itu kedudukan warga dalam membayar pajak mempengaruhi Negera. Pemungutan pajak serta alokasi anggaran dipisah menjadi pemungutan pajak pusat serta pemungutan pajak wilayah. Pajak pusat merupakan pajak yang di administrasikan langsung oleh pemerintah pusat (Direktoral Jendral Pajak) yang terletak dibawah administrasi Kementerian Finansial, kebalikannya pajak area ialah pajak yang diatur penguasa area dalam pengelolaan kadar Provinsi dan

Kabupaten atau Kota. Perihal selanjutnya diklaim kalau pajak merupakan partisipasi atas area yang terutang oleh orang perseorangan ataupun tubuh yang bersangkutan buat berasal dari Hukum, dengan tidak mendapatkan ubah cedera langsung serta dipakai buat kebutuhan kedaerahan untuk kelimpahan orang sebesar- besarnya, menurut Pasal 1 Ayat 10 UU No. 28 Tahun 2009.

Dari diberlakukannya otonomi wilayah di Indonesia dalam 1 Januari 2001 menginginkan area buat inovatif pada mencari basis pendapatan yang dapat mendanai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Mengenang Mengenai itu masing- masing wilayah berkuasa dan bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri untuk tingkatkan jasa pada masyarakat. Akibatnya dikala ini pajak wilayah jadi salah satu pendapatan penting rezim wilayah. Pemberlakuan Undang- Undang Rezim wilayah mengatur bila pajak dan banderol wilayah yakni salah satu basis pendapatan wilayah dan dapat dibesarkan cocok dengan keinginan dan kondisi wilayah itu. Salah satu bagian pajak wilayah ialah pajak alat transportasi bermotor yang masing- masing tahunnya dibayarkan oleh wajib pajak alat transportasi bermotor berlaku seperti donor paling banyak pendapatan pajak wilayah.

**Tabel 1**  
Tabel Data Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

| No | Tahun | Target          | Realisasi       | Belum Terealisasi |
|----|-------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1. | 2020  | 236.000.000.000 | 207.000.000.000 | 29.000.000.000    |
| 2. | 2021  | 255.037.000.000 | 242.265.155.510 | 12.771.844.490    |

*Sumber : UPPD Kabupaten Sukoharjo*

Bersumber pada tabel diatas membuktikan kalau tahun 2020 serta 2021 hadapi penyusutan tingkatan pemasukan pajak tiap tahunnya. Dalam usaha memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pemerintah wilayah melaksanakan sebagian strategi yang dicoba antara lain program pembebasan kompensasi, banderol balik julukan (BBN) dan pemindahan selama 5 bulan dan membuka kedai samsat kisaran di 12 kecamatan dengan cara bergiliran sehabis itu membuka kedai samsat di pusat perbelanjaan semacam Mitra Swalayan, Toserba Luwes serta The Park Mall.

Sanksi pajak ialah jaminan jika syarat perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) hendak dituruti, ditaati dan dipatuhi atau dengan tutur lain ganjaran perpajakan yakni perkakas pencegah biar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Peningkatan sanksi denda pajak ialah perihal yang ditakuti oleh wajib pajak sebab jumlah pajak yang wajib dibayarkan jadi berlipat ganda. Di Indonesia masih banyak penduduk yang belum menguasai pengertian serta manfaat pajak, perihal ini memunculkan pemahaman masyarakat untuk membayar pajak yang terkategori rendah. Oleh sebab itu pemerintah wajib melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada warga, paling utama penduduk awam yang belum menguasai apa makna dari arti pajak untuk masyarakat. Hasil sosialisasi diharapkan bisa tingkatkan pemahaman tentang membayar pajak serta pula pengaruhi kepatuhan wajib pajak, mutu jasa pula amat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2**  
Tabel penunggak pajak kendaraan disukoharjo

| No | Jenis Kendaraan | 2020    | 2021    |
|----|-----------------|---------|---------|
| 1  | Roda dua        | 166.923 | 143.973 |
| 2  | Roda empat      | 18.499  | 27.005  |

*Sumber : UPPD Kabupaten Sukoharjo*

Bersumber pada tabel diatas, jumlah penunggak wajib pajak buat kabupaten sukoharjo, tipe roda dua ditahun 2020 sebanyak 166.923 wajib pajak serta roda empat 18.499 wajib pajak. Pada tahun 2021 jumlah penunggak wajib pajak di roda dua sebanyak 143.973 serta roda empat 27.005. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam membayar pajak mempengaruhi pada hasil pemasukan serta realisasi wajib pajak. Oleh karena itu diperlukannya pemahaman dalam membayar pajak guna kepentingan Negara. Sebagian peneliti yang sudah dicoba lebih dahulu, ditemui variabel yang tidak berubah-ubah, ialah riset yang melaporkan kalau elastis itu berkaitan dengan cara penting namun ada studi lain yang memberi tahu jika elastis itu tidak penting kepada kepatuhan wajib pajak. Dalam elastis ganjaran pajak bag (Ratna, 2018) meyakinkan hasil kalau elastis ganjaran pajak mempengaruhi penting kepada kepatuhan wajib pajak, kebalikannya dalam riset (Maulana, 2018) meyakinkan hasil kalau ganjaran pajak tidak mempengaruhi penting kepada kepatuhan wajib pajak.

Sehabis itu dalam elastis mutu jasa pajak bagi (Cahya, 2019) meyakinkan hasil kalau elastis mutu jasa pajak mempengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak, kebalikannya dalam riset (Komang dkk, 2021) meyakinkan hasil kalau elastis mutu jasa pajak tidak mempengaruhi kepada kepatuhan wajib pajak. Sehabis itu dalam elastis uraian wajib pajak untuk (Rumiyatun dkk, 2017) meyakinkan hasil kalau elastis pemahaman wajib pajak mempengaruhi penting kepada kepatuhan wajib pajak, kebalikannya dalam studi (Marsono dkk, 2020) meyakinkan hasil kalau elastis kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi penting kepada kepatuhan wajib pajak. Berasal dalam kerangka balik yang telah dipaparkan oleh peneliti, pengamat mau mengenali akibat pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak kepada kepatuhan wajib pajak alat transportasi bermotor di Samsat Sukoharjo.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak ialah pungutan wajib dari rakyat untuk Negera yang mempunyai manfaat guna membiayai pengeluaran- pengeluaran Negera. Oleh sebab itu, pajak digunakan selaku sumber pendanaan Negera serta sasaran pemungutan pajak tiap tahun. Basis pendapatan pajak dibedakan jadi pajak pusat dan pajak area. Pajak pusat ialah pajak yang didapat untuk kebutuhan yang lebih besar. Pajak area yakni pajak yang dipungut dan diatur oleh penguasa bagus ditingkat Kabupaten atau kota. Beberapa pendapat oleh ahli tentang penafsiran pajak.

1. Pajak merupakan pungutan ataupun iuran warga kepada Negera yang bisa dipaksakan dan tertuang untuk yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat ditunjuk serta dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan Negera. (Profesor. Dokter. PJA. Adriani, 2014)
2. Pajak adalah keterlibatan wajib untuk Negera yang terutang oleh orang orang atau tubuh yang berkarakter memforsir berasal dalam Undang- Undang dengan tidak mendapatkan balasan dengan cara langsung dan dipakai untuk kebutuhan Negera buat sebesar- besarnya kelimpahan orang. (Undang- Undang Nomor 28 Tahun, 2007)

### Pajak Kendaraan Bermotor

Yakni salah satu basis pendapatan pajak yang mempengaruhi kadar pendapatan wilayah. Oleh karena itu, diperlukannya akuisisi PKB yang maksimum melalui kadar kepatuhan wajib pajak yang besar kepada peranan melunasi pajak. Pajak alat transportasi bermotor yakni pajak atas kepemilikan atau kemampuan alat transportasi bermotor. Poin alat transportasi bermotor ialah orang orang atau tubuh yang memiliki alat transportasi bermotor. Kebalikannya poin pajak alat transportasi bermotor ialah kepemilikan atas alat transportasi bermotor.

Pajak kendaraan bermotor yakni salah satu usaha pada mendanai pembangunan wilayah. Karena partisipasi di zona pajak buat pendapatan asli wilayah cukup besar. Sampai dari itu memerlukan dioptimalkan nya pendapatan dari zona pajak melewati berbagai usaha yang mampu tingkatan jumlah pendapatan pajak salah satunya dengan memencet utang pajak alat transportasi bermotor.

Menurut peneliti (Wardani dkk, 2017) wawasan perpajakan yakni penjelasan dasar buat wajib pajak mengenai hukum, undang- undang, dan cara perpajakan yang betul. Wawasan perpajakan yakni mengenai pokok yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Dengan adanya wawasan perpajakan ini dapat membantu wajib pajak buat menaati pembayaran pajaknya, alhasil kadar wajib pajak akan meningkat. Dengan melunasi pajak dengan cara teratur warga pula leluasa dari ganjaran pajak. Berdasarkan (UU Nomor 28 Th 2007) pajak yakni kedudukan dan wajib pajak pada negeri yang terutang oleh orang orang atau tubuh yang karakternya menekan dan tidak mendapatkan balasan dengan cara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan negeri buat kelimpahan orang.

Menurut (Susanto, 2021) pajak memiliki unsur- faktor antara lain:

1. Pajak ialah kedudukan dan dari warga untuk negeri. Yang berkuasa memungut pajak ialah negeri, bagus melalui penguasa pusat atau area dan iuran yang dibayarkan berupa uang.
2. Pajak dipungut berasal dalam Hukum dan watak pemungutan pajak ini dipaksakan berasal dalam wewenang yang diatur oleh Hukum bersama determinasi pelaksanaannya.
3. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negeri.

Pengetahuan pajak sangat diperlukan dalam penghitungan pajak, tidak cuma menghitung diperlukannya pula ketentuan ataupun larangan untuk menghindari terdapatnya sanksi pajak. Bagi penelitian- penelitian terdahulu bisa disimpulkan pengetahuan pajak ialah data yang bisa dipakai wajib pajak berlaku seperti bawah buat mengutip ketetapan atau strategi khusus yang berhubungan dengan

aplikasi hak serta kewajiban warga. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat, lewat pengetahuan resmi serta non resmi hendak berakibat positif terhadap uraian wajib pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2011) sanksi pajak yakni agunan jika ketentuan peraturan perundang-ajakan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Ganjaran ialah ganjaran yang diserahkan pada wajib pajak yang melanggar peraturan undang-undang, salah satu ganjaran pula dapat diserahkan pada wajib pajak yang terdaftar berasal dalam metode hukum berlaku seperti wajib pajak. Pengenaan ganjaran perpajakan diberlakukan buat membuahkan kepatuhan wajib pajak pada melunasi pajaknya oleh sebab itu buat wajib pajak butuh memahami sanksi- ganjaran yang legal pada perpajakan. Bila melanggar ganjaran dapat dikenakan bahaya berupa ganjaran administrasi atau ganjaran kejahatan. Ganjaran administrasi berupa pembayaran kehilangan kepada negara, ganjaran kejahatan berupa kompensasi kejahatan. Kompensasi kejahatan berupa kompensasi administrasi yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, kompensasi kejahatan dikenakan pada perbuatan kejahatan yang beradat pelanggaran atau beradat kesalahan.

Menurut (Megantara, 2017) sosialisasi pajak ialah upaya yang dicoba Direktorat Jendral Pajak dalam membagikan suatu wawasan pada masyarakat serta untuk wajib pajak biar mengidentifikasi mengenai semua Mengenai mengenai perpajakan bagus peraturan atau aturan cara perpajakan melalui aturan metode yang pas.

Kualitas pelayanan ini yakni wujud evaluasi pelanggan kepada kadar jasa yang diperoleh dengan kadar jasa yang diharapkan, bila jasa yang diperoleh cocok dengan yang diharapkan hingga mutu jasa bisa dibidang bagus serta melegakan. Mutu jasa pula bisa diartikan jadi sesuatu yang berkaitan dengan terpenuhinya impian dimana jasa dapat dibidang baik dan bagus bila dapat sajikan produk atau pelayanan jasa yang sesuai dengan keinginan dan impian klien. Mutu jasa yang diserahkan oleh aparat pajak amat membenarkan energi untuk peraturan perpajakan. Terdapat pula misi dari kualitas jasa pajak yakni tingkatkan mutu daya produksi aplikasi kewajiban dari instansi penguasa di aspek jasa umum, menekan usaha efektifitas sistem dan aturan aplikasi jasa alhasil jasa dapat dilaksanakan dengan cara efektif dan efektif, mendesak tumbuhnya kreatifitas, prakarsa serta kedudukan dan warga dalam tingkatkan pembangunan kesejahteraan warga lain.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### Populasi serta Sampel

Arti populasi menurut (Sugiyono, 2019) ialah wilayah abstraksi yang terdiri atas subjek yang mempengaruhi karakteristik dan kuantitatif khusus yang diaplikasikan oleh pengamat supaya dipelajari dan sehabis itu ditarik kesimpulan. Populasi pada studi ialah seluruh wajib pajak alat transportasi bermotor di Sukoharjo. Aturan metode yang dipakai dalam pengumpulan data berkarakter pokok yakni dengan mengedarkan kuisioner.

Arti sampel menurut (Sugiyono, 2019) yakni bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu. Ilustrasi yang dipilih mengenakan metode ilustrasi acak sampling karena data pokok yang dipakai pada studi ini dipilih dengan cara random. Alhasil esoknya data digabungkan mengenakan kuisioner. Terdapat pula rincian jumlah wajib pajak alat transportasi bermotor cakra dua yang terdaftar di Kantor Samsat Sukoharjo

Tabel 2  
Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo 2021

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah  |
|----|-----------------|---------|
| 1  | Mobil           | 55.857  |
| 2  | Bus             | 702     |
| 3  | Truk            | 13.378  |
| 4  | Sepeda Motor    | 541.604 |
|    | Jumlah          | 611.541 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Menurut tabel di atas, Kabupaten Sukoharjo memiliki 611.541 wajib pajak transportasi bermotor, sebagian di antara lain mempunyai sepeda motor. Buat mengirit durasi, cuma sebagian besar populasi wajib pajak yang lagi dipelajari pada riset ini, dari seluruh wajib pajak. Resep Slovin dipakai buat menjamin skala coretan wajib pajak alat transportasi bermotor yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

---

*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kab Sukoharjo ( Sinta Nur Aini, Arif Nugroho Rachman)*

$$N = N / (1 + N \cdot (e)^2)$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = margin error yang ditoleransi

$$n = 541.604 / (1 + 541.604 \cdot (10\%)^2)$$

$$n = 541.604 / (1 + 541.604 \cdot 0.01)$$

$$n = 541.604 / (1 + 5416,05)$$

$$n = 541.604 / 5417,05$$

n = 99,981 dibulatkan menjadi 100

Bahwasanya dihasilkan sampel 100, pengumpulan ilustrasi dicoba dengan cara random dengan memakai metode acak sampling. Ilustrasi yang penuh pada riset ini merupakan semua wajib pajak alat transportasi bermotor cakra 2 yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo.

### **Alat Analisis Data**

#### **Uji Validitas**

Percobaan keabsahan memutuskan tingkatan kesesuaian antara data yang betul- betul tertancap pada artefak serta informasi yang digabungkan oleh periset (Sugiyono, 2017). Percobaan keabsahan ini memakai angket selaku perlengkapan ukur buat memperhitungkan keabsahan data.

#### **Uji Reabilitas**

Sepanjang mana penemuan pengukuran memakai item yang serupa serta berupaya membuahkan data yang serupa diucap selaku percobaan kenyataan. Sepanjang riset, uji Alpha Cronbach dipakai. Bila angka Alpha Cronbach elastis kurang dari 0, 7, itu dikira bisa diharapkan.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Menurut (Ghozali, 2016), percobaan normalitas dibesarkan buat memastikan apakah elastis bebas serta terbatas, ataupun keduanya, pada bentuk regresi mempunyai penyaluran yang seimbang ataupun tidak natural. Cara uji Kolmogorov- Smirnov bisa dipakai buat melaksanakan uji wajar. Bila angka kebolehjadian lebih besar dari 0, 05, percobaan normalitas bisa dibilang didistribusikan dengan betul; kebalikannya, bila angka kebolehjadian lebih kecil dari 0, 05, informasi tidak didistribusikan dengan bagus.

##### **Uji Multikolinearitas**

Untuk membenarkan apakah elastis bebas serta terbatas, ataupun keduanya, pada bentuk regresi mempunyai penyaluran yang seimbang ataupun tidak natural, percobaan multikolinearitas terbuat, bagi (Ghozali, 2016). Buat melaksanakan pengesanan teratur, manfaatkan cara uji Kolmogorov- Smirnov. Percobaan normalitas bisa dibilang terdistribusi dengan pas bila angka probabilitasnya lebih besar dari 0, 05. Di bagian lain, bila angka kebolehjadian lebih kecil dari 0, 05, informasi tidak didistribusikan dengan cara mencukupi.

##### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas dipakai buat mengenali apakah ada perbandingan varians antara residu satu observasi dengan observasi yang lain pada bentuk regresi. Bagi (Ghozali, 2016), bentuk regresi yang sesuai tidak mencampurkan homoskedastisitas ataupun heteroskedastisitas. Kala angka penting lebih dari 0,05, bentuk regresi dibilang heteroskedastik.

#### **Analisis regresi linier berganda**

Bentuk regresi dengan sebagian elastis bebas merupakan apa terdapatnya. Buat mengenali arah serta tingkatan akibat aspek bebas kepada elastis terbatas, dipakai analisa regresi linier berganda (Ghozali, 2018). Pertemuan buat regresi berganda merupakan selaku selanjutnya:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

a : Konstanta

B<sub>1</sub>-B<sub>4</sub> : Koefisien Regresi

- $X_1$  : Kesadaran wajib pajak  
 $X_2$  : Sanksi pajak  
 $X_3$  : Sosialisasi pajak  
 $X_4$  : Kualitas pelayanan

#### Uji Parsial( Uji Statistik T)

Menurut (Ghozali, 2016), misi pemakaian statistik percobaan merupakan buat menguasai gimana tiap elastis bebas pengaruhi tiap elastis terbatas. Patokan riset ini merupakan angka signifikansi  $> 0,05$  hipotesis tolak.

#### Uji Simultan( Uji Statistik F)

Uji F adalah tes yang digunakan untuk mengevaluasi dampak semua faktor independen terhadap variabel dependen, atau uji signifikansi model yang diucapkan, menurut (Widarjono, 2018). Analisis varians, sering dikenal sebagai ANOVA, dapat digunakan untuk menjelaskan tes F. Jika hitungan F melebihi F kritis, kita dapat menolak hipotesis nol  $H_0$ , yang menunjukkan bahwa faktor independen dan dependen saling mempengaruhi secara bersamaan. Kebalikannya berlaku jika F dihitung kurang dari Critical F, dan seterusnya sampai kita mencapai  $H_0$ , yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat secara bersamaan mempengaruhi variabel dependennya.

#### Uji Koefisien Determinasi( Adjusted R2)

Koefisien uji determinasi, menurut (Widarjono, 2018) merupakan uji untuk mengetahui persentase variabel dari variabel dependen yang disajikan oleh faktor independen. Selain itu, efektivitas garis regresi yang kita miliki dapat dievaluasi menggunakan uji koefisien determinasi. Ketika perkiraan koefisien determinasi variabel mendekati 1, dapat diklaim bahwa variabel independen cukup menjelaskan variabel dependen. Selain itu, variabel independen mengalikan variabel dependennya jika koefisien determinasi kurang dari satu (1) atau mendekati nol (0)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas serta Realibilitas Data

Bersumber pada hasil uji validitas dibuktikan kalau seluruh butir persoalan dalam kuesioner dinyatakan valid. Perihal ini sebab  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

Bersumber pada uji realibilitas bisa dikenal kalau tiap butir persoalan dinyatakan reliabel. Perihal ini sebab tiap butir persoalan pada tiap variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha diatas 0,70

Tabel 3. Uji Realibilitas

| Reliability Statistics |            |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | N of Items |
| .975                   | 24         |

Data Primer Olahan. 2022

Bersumber pada tabel diatas bisa disimpulkan kalau variabel- variabel yang digunakan dalam riset ini reliabel, sebab tiap variabel mempunyai Cronbach Alpha 0,975 yang maksudnya lebih besar dari 0,70.

### Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), percobaan normalitas dipakai buat memastikan apakah elastis bebas serta terbatas, ataupun keduanya, pada bentuk regresi mempunyai penyaluran yang seimbang ataupun tidak normal. Cara uji Kolmogorov- Smirnov bisa dipakai buat melaksanakan uji normal.

Tabel 4 Uji Normalitas

| One-Sample<br>Kolmogorov-Smirnov Test   |                                  |                                |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                  | Unstandar<br>dized<br>Residual |
| N                                       |                                  | 100                            |
| Normal<br>Paramete<br>rs <sup>a,b</sup> | Mean<br>Std.<br>Deviation        | .000000<br>164.284.371         |
| Most<br>Extreme<br>Differenc<br>es      | Absolute<br>Positive<br>Negative | .062<br>.047<br>-.062          |
| Kolmogorov-Smirno<br>v Z                |                                  | .619                           |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                  |                                  | .839                           |
| a. Test distribution is Normal.         |                                  |                                |
| b. Calculated from data.                |                                  |                                |

*Data Primer Olahan, 2022*

Berasal dalam bagan diatas, dapat disimpulkan jika data residual itu terdistribusi dengan alami. Karena angka Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,839 yang artinya lebih besar dari angka kebolehjadian sebesar 0,06.

#### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas menurut (Imam, 2016), berupaya buat memastikan apakah elastis bebas serta terbatas bentuk regresi, ataupun keduanya, mempunyai penyaluran yang seimbang ataupun tidak normal. Percobaan statistik hendak membuahkan penemuan yang lebih kecil bila terdapat suatu yang tidak terdistribusi dengan cara seimbang. Angka Tolerance serta angka Variance Inflation Factor (VIF) bisa dipakai buat memvisualkan percobaan multikolinearitas..

| Tabel 5 Uji Multikolinearitas |                            |            |
|-------------------------------|----------------------------|------------|
| Model                         | Collinearity<br>Statistics |            |
|                               | Tolerance                  | VIF        |
|                               | (Constant)                 |            |
| 1                             | Kesadaran                  | .184 5.445 |
|                               | Sanksi                     | .119 8.408 |
|                               | Sosialisasi                | .129 7.776 |
|                               | Kualitas<br>Pelayanan      | .114 8.736 |

*Data Primer Olahan, 2022*

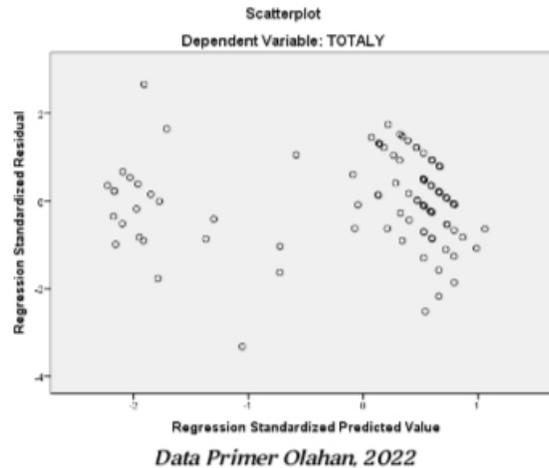
Titik-titik itu kelihatannya membuat pola khusus serta menabur dengan cara random di atas serta di dasar nilai 0 dalam sumbu Y, bagi denah Scatterplot yang ditunjukkan di atas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dipakai buat mengenali apakah ada kesenjangan varians antara residu satu observasi dengan yang yang lain pada bentuk regresi. Idealnya, bentuk regresi tidak bisa memutuskan homoskedastisitas ataupun heteroskedastisitas (Ghozali, 2016)

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas



Titik-titik itu kelihatannya membuat pola khusus serta menabur dengan cara random. Sampai dapat disimpulkan kalau tidak terjalin heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 7 Analisis Regresi**

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t    | Sig.  |       |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|-------|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |      |       |       |
|       | (Constant)                  | 1.100      | .699                      |      | 1.573 | .119  |
| 1     | Kesadaran                   | .222       | .098                      | .228 | 2.270 | .025  |
|       | Sanksi                      | .245       | .083                      | .370 | 2.963 | .004  |
|       | Sosialisasi                 | -.005      | .113                      | .000 | .000  | 1.000 |
|       | Kualitas Pelayanan          | .229       | .085                      | .341 | 2.680 | .009  |

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan persamaan regresi-nya adalah

$$Y = 1,100 + 0,222X_1 + 0,245X_2 + 0,005X_3 + 0,229X_4 + e$$

**Uji Parsial( Uji Statistik T)**

Uji statistik digunakan, sebagian sesuai dengan (Ghozali, 2018), untuk mengenali akibat tiap- tiap elastis bebas kepada elastis terbatas. Bila angka signifikansi kurang dari ataupun serupa dengan 0,05, anggapan diperoleh, serta bila lebih besar dari ataupun serupa dengan 0,05, anggapan ditolak.

**Tabel 8 Uji Statistik T Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                    | t     | Sig.  |
|-------|--------------------|-------|-------|
| 1     | (Constant)         | 1.573 | .119  |
|       | Kesadaran          | 2.270 | .025  |
|       | Sanksi             | 2.963 | .004  |
|       | Sosialisasi        | .000  | 1.000 |
|       | Kualitas Pelayanan | 2.680 | .009  |
|       |                    |       |       |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Data Primer Olah, 2022

Menurut tabel uji-t, dampak masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagian sebagai berikut: sebuah.

- a. Signifikansi pemahaman wajib pajak membuahkan 0,25 > 0,05, membuktikan kalau kepatuhan pajak wajib dipengaruhi dengan cara penting oleh wajib pajak yang mempunyai alat transportasi bermotor.
- b. Pentingnya Denda pajak yang dicapai pada kisaran 0,004 sampai dengan 0,05 menunjukkan bahwa denda memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- c. Signifikansi sosialisasi pajak sebagaimana ditetapkan oleh  $1.000 > 0,05$ , menunjukkan bahwa sosialisasi pajak sedikit atau tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- d. Pentingnya Tingkat pelayanan yang diperoleh sebesar  $0,009 < 0,05$  menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### Uji Simultan( Uji Statistik F)

Bersamaan dengan (Widarjono, 2018) Uji F, pula diketahui selaku percobaan signifikansi bentuk yang diucapkan, merupakan uji yang dipakai buat mencoba akibat seluruh aspek bebas kepada elastis terbatas. Analisa varia, pula diketahui selaku analysis of variance (ANOVA), bisa dipakai buat menyuguhkan uji F.

Tabel 9 Uji Statistik F  
ANOVA<sup>a</sup>

| Model |                | F       | Sig.              |
|-------|----------------|---------|-------------------|
| 1     | Regressio<br>n | 110.770 | .000 <sup>b</sup> |
|       | Residual       |         |                   |
| Total |                |         |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Sosialisasi, Sanksi

Data Primer Olah 2022

Berasal dalam ANOVA didapat angka penting 0,000, oleh karena itu kebolehjadian jauh lebih kecil dari dalam 0,05 sampai dapat diklaim jika elastis uraian wajib pajak, ganjaran pajak, pemasyarakatan pajak dan kualitas jasa pajak dengan cara bersama- serupa pengaruh penting kepada elastis kepatuhan wajib pajak.

#### Uji Koefisien Determinasi( Adjusted R2)

Koefisien uji determinasi, menurut (Widarjono, 2018), merupakan percobaan buat menaikkan nisbah pergantian elastis terbatas yang dihidangkan oleh elastis bebas. Tidak hanya itu, koefisien percobaan pemastian bisa dipakai buat mengukur seberapa bagus kemampuan garis regresi yang kita punya.

Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi R

#### Model Summary

| Model | R                 | R<br>Square | Adjusted<br>R<br>Square | Std. Error<br>of the<br>Estimate |
|-------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1     | .907 <sup>a</sup> | .823        | .816                    | 1.677                            |

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Sosialisasi, Sanksi

Data Primer Olah 2022

Berasal dalam bagan diatas, memastikan jika Adjusted R2 untuk bentuk ini senilai 0, 816 yang artinya penyaluran semua elastis lapang kepada Y senilai 81, 6 Persen lebihnya (100 Persen-81,6 Persen) = 18 4 Persen dipaparkan oleh variabel- elastis lain diluar bentuk yang dipaparkan pada studi ini.

### **1. Hipotesis 1: Kesadaran Wajib Pajak( X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Y)**

Analisa regresi yang dipakai buat pengujian anggapan membuahkan koefisien regresi buat ikatan antara uraian pajak serta kepatuhan kepada hukum dengan angka  $B = 0,222$ , tingkat signifikansi  $0,025 < 0,05$ , dan nilai  $t$  komputasi = tabel  $2,270 > t$  tabel =  $1,985$  Angka penting kurang dari  $0,05$  jadi fakta kalau anggapan kalau akibat uraian wajib pajak mempengaruhi positif serta penting kepada kepatuhan wajib pajak bisa diperoleh. Mengenang koefisien positif serta penting, bisa dibilang kalau ikatan keduanya searah, maksudnya sepanjang terdapat tingkatan kepatuhan wajib pajak yang besar kepada pajak alat transportasi bermotor di Samsat Sukoharjo, hendak lalu terdapat uraian yang bagus dari masyarakat negeri pada perihal melunasi pajak. Hasil begitu selaras dengan studi(Cahya,2019)jika uraian wajib pajak pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak alat transportasi bermotor.

### **2. Hipotesis 2: Sanksi Pajak( X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Y)**

Analisa regresi yang dipakai pada pengujian anggapan membuahkan koefisien regresi ikatan antara kompensasi pajak dengan kepatuhan kepada hukum dengan angka  $B = 0,245$ , tingkat signifikansi  $0,004 < 0,05$ , dan nilai hitung tabel  $2,963 > t$  tabel =  $1,985$ . Hasil penting kurang dari  $0,05$  jadi fakta kalau anggapan yang membuktikan kalau akibat ganjaran pajak dengan cara profitabel serta penting pengaruh kepatuhan wajib pajak bisa diperoleh. Memikirkan koefisien dengan gejala positif serta penting, bisa disimpulkan kalau ikatan keduanya searah, membuktikan kalau hendak lalu terdapat tingkatan kepatuhan yang besar di antara wajib pajak pada melunasi pajak alat transportasi bermotor di Samsat Kab Sukoharjo. Hasil begitu selaras dengan studi(Ratna,2018)jika ganjaran pajak pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak alat transportasi bermotor.

### **3. Hipotesis 3: Sosialisasi Pajak( X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Y)**

Akibat pemasyarakatan perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak dicoba dengan memakai metode analisa regresi, yang membuahkan koefisien regresi dengan angka  $B = - 0,05$ , tingkat signifikan  $1.000 > 0,05$ , dan nilai  $t$  hitung =  $0,000$   $t$  tabel  $1,985$ . Angka penting yang lebih besar dari  $0,05$  jadi fakta kalau anggapan yang membuktikan kalau akibat pemasyarakatan pajak tidak pengaruh serta tidak berarti untuk kepatuhan wajib pajak tidak melegakan. Mengenang kalau koefisien tidak berarti serta diisyaratkan dengan cara minus, bisa disimpulkan kalau ikatan antara keduanya berkarakter 2 arah. Perihal ini mengisyaratkan kalau dasar kepatuhan wajib pajak jadi lebih disosialisasikan pajak, yang merendahkan elastis kepatuhan pajak bermotor disukoharjo. Hasil begitu selaras dengan studi(Komang dkk,2021)jika pemasyarakatan pajak tidak pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak alat transportasi bermotor.

### **4. Hipotesis 4: Kualitas Pelayanan Pajak( X4) terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Y)**

Analisa regresi yang dipakai pada pengujian anggapan membuahkan koefisien regresi buat ikatan antara kepatuhan wajib pajak dengan mutu jasa perpajakan dengan angka  $B = 0,229$ , tingkat signifikan  $0,009 < 0,05$ , dan nilai  $t$  komputasi = tabel  $2,680 > t$  tabel =  $1,985$ . Hasil penting kurang dari  $0,05$  jadi fakta kalau anggapan yang memberi tahu kalau mutu jasa perpajakan berakibat positif serta penting kepada kepatuhan wajib pajak belum bisa diperoleh sedemikian itu saja. Ikatan keduanya berkarakter searah, membuktikan hendak lalu jadi tingkatan jasa yang besar sampai lalu terjalin tingkatan kepatuhan wajib pajak yang besar pada melunasi pajak alat transportasi bermotor, bersumber pada penanda positif serta penting koefisien. Hasil begitu selaras dengan studi rizki (2018) kalau kualitas pelayanan pajak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penemuan kajian ini mensupport statment kalau kompensasi pajak, pemasyarakatan pajak, serta standar jasa pajak seluruhnya mempunyai akibat besar dalam kepatuhan wajib pajak kepada peraturan yang berhubungan dengan alat transportasi bermotor. Akibat kompensasi pajak kepada kepatuhan wajib pajak alat transportasi bermotor amat besar. Sebab mayoritas orang tidak mengenali metode melunasi pajak alat transportasi bermotor, pemasyarakatan pajak tidak banyak berakibat dalam kepatuhan. Sedang ada kasus alat serta infrastruktur pada jasa yang diserahkan pada wajib pajak alat transportasi bermotor, yang berakibat dalam kepatuhan mereka kepada hukum perpajakan.

### **Saran**

Terdapat sebagian perihal yang bisa diinformasikan pada pihak- pihak yang terpaut bersumber pada penemuan amatan. Masyarakat menyambut indoktrinasi dari administratur Samsat mengenai apa maksudnya melunasi pajak pas durasi. Tidak hanya itu, butuh dinaikkan counter pembayaran pajak supaya

tidak terjalin akumulasi ataupun antrean yang sangat jauh buat menaikkan mutu jasa perpajakan serta membenarkan wajib pajak konsisten melunasi pajak pas durasi. Aplikasi lekas menanggulangi wajib pajak menerangkan perlunya ganjaran pajak yang harus. Dianjurkan supaya periset selanjutnya menaikkan faktor-faktor yang diduga berakibat dalam kepatuhan wajib pajak di kantor Samsat Sukhoarjo alhasil hasilnya bisa diharapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- M. I. Andimulana (2018). Kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor dan dampak pengetahuan wajib pajak, sistem pemungutan pajak, denda pajak, dan kualitas pelayanan (Samsat Cinere). *Skripsi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti*.
- Herawati, J. D., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor. *AKTUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 99–109.
- Kadek Megantara. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 (*Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*). *JIMAT Undiksha*, 7(1).
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani . (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Kantor Samsat Gianyar). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*.
- Okky Cahya Akbar. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani . (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Kantor Samsat Gianyar). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*.
- Okky Cahya Akbar. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.
- Ratna . (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Bersama Samsat Mojokerto). *Akuntansi Akunesa*, 6 NO 2.